

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan sasaran serta indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah. Adapun program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Terdapat enam bidang prioritas yang menjadi agenda terdepan pembangunan di Kota Bogor dalam periode 2015 – 2019. Keenam bidang prioritas tersebut adalah:

1. Penataan transportasi dan angkutan umum

Terdapat stigma negatif yang melekat untuk Kota Bogor selama ini yaitu “kota sejuta angkot“. Stigma ini melekat bersamaan dengan berbagai permasalahan transportasi yang muncul lainnya seperti kemacetan dan isu lainnya seperti transportasi ramah lingkungan. Bidang prioritas ini akan memuat program-program untuk mengatasi segala permasalahan tersebut sekaligus membangun fondasi bagi pengembangan transportasi kota yang berkelanjutan di masa mendatang. Strategi-strategi yang digunakan diantaranya adalah rasionalisasi jumlah dan ukuran angkutan kota, memaknai transportasi sebagai “pergerakan, bukan perpindahan“ orang melalui jalur sepeda dan pedestrian, serta minimalisasi pergerakan kendaraan melalui penyediaan fasilitas parkir yang tersentralisasi. Penataan transportasi dan angkutan umum akan diwujudkan dengan lima program yang akan dilaksanakan pada kurun waktu RPJMD 2015-2019, sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Angkutan;
2. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi;
3. Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
4. Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi;
5. Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan.

2. Penataan pelayanan persampahan dan kebersihan kota

Menjaga karakter Kota Bogor sebagai kota yang hijau dan penuh dengan taman menjadi tantangan tersendiri ketika menghadapi permasalahan soal sampah. Kompleksitas pengelolaan sampah selalu berkorelasi positif dengan jumlah penduduk, dan dengan jumlah penduduk yang sudah menembus angka satu juta jiwa (dan ini yang menjadi definisi kawasan metropolitan), maka kompleksitasnya membutuhkan penanganan yang tidak hanya sekadar *business as usual*. Bidang prioritas ini menyasar pengelolaan sampah secara holistik, mulai dari level bangkitan timbulan (penghasil sampah baik rumah tangga maupun non rumah tangga), pengangkutan, penampungan, pengolahan, hingga pembuangan. Pengelolaan ini dimulai dari level pertama, sekaligus menjadi tantangan terbesar, yaitu bagaimana timbulan sampah dikurangi sejak dari tingkat rumah tangga. Terwujudnya pelayanan persampahan dan kebersihan kota didukung oleh empat program yakni:

1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
2. Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA;
3. Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R;
4. Pengembangan Lingkungan Sehat.

3. Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Sejarah krisis moneter di Indonesia menunjukkan bahwa sektor non formal seperti pedagang kaki lima adalah sektor dengan daya tahan yang tangguh terhadap segala macam guncangan ekonomi. Sektor ini dapat bertahan dan mampu menjadi penyelamat bagi ratusan ribu, mungkin jutaan, orang yang

mengelutinya sebagai profesi dan jauh lebih banyak lagi dari sisi keluarga yang dihidupi.

Di sisi lain, muncul banyak ekses negatif dari aktivitas Pedagang Kaki Lima yang tidak tertata seperti kemacetan, kekumuhan, terampasnya ruang publik, hingga premanisme. Oleh karenanya, penataan Pedagang Kaki Lima mutlak dilakukan sehingga sebagai aktivitas ekonomi, Pedagang Kaki Lima dapat dipertahankan namun dengan ekses negatif yang tetap diminimalkan. Beberapa strategi yang diambil adalah penyediaan lokasi pengganti (melalui relokasi berdasar *zoning regulation* dan revitalisasi pasar), menguatkan kelembagaan Pedagang Kaki Lima sehingga anggotanya yang berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima itu jelas dan terdata, kemudian kampanye hingga strategi terakhir adalah penindakan, baik oleh Satpol PP maupun dukungan bantuan dari TNI/Polri. Dua program yang mendukung penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima antara lain:

1. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
2. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

4. Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, Bogor adalah kota dengan karakter hijau, sebuah kota di dalam taman. Penataan ruang publik, pedestrian, taman dan Ruang Terbuka Hijau lainnya menjadi penguat akan karakter tersebut, dan dapat menjadi pembeda dengan kota-kota lainnya. Ruang yang disasar khususnya adalah ruang sepanjang sungai (bantaran), sepanjang jalan, aset-aset (baik milik daerah maupun pihak lainnya) yang bisa dioptimalisasi menjadi Ruang Terbuka Hijau, dan ruang privat (pekarangan rumah). Selain itu, mekanisme insentif dan disinsentif juga perlu dikembangkan baik bagi individu maupun institusi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pelaksanaan prioritas ini. Program yang mendukung terwujudnya penataan ruang publik, pedestrian, taman dan RTH adalah:

1. Pembangunan Prasarana Pedestrian dan Pesepeda;
2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

5. Transformasi budaya dan reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi telah menjadi agenda nasional untuk sekian lamanya namun tak kunjung juga memperlihatkan hasil nyatanya. Salah satu penyebab utama dari lambatnya reformasi birokrasi bergulir adalah bahwa segala permasalahan di dalam birokrasi yang hendak direformasi ini bukanlah sekadar permasalahan struktural semata, melainkan sudah menjadi permasalahan budaya/kultur.

Soal struktural akan lebih mudah untuk ditangani karena cukup diselesaikan di level kebijakan saja, akan tetapi soal kultural, dengan praktek dan kebiasaan yang telah menurun selama puluhan tahun lamanya, menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, bidang prioritas kelima dari Walikota Kota Bogor adalah “Transformasi budaya dan reformasi birokrasi”, karena birokrasi yang berubah tidak dapat dipisahkan dengan budaya yang bertransformasi.

Pada akhirnya, mengubah budaya ini harus diawali dengan menerapkan sistem yang baik dan mampu memaksa anggota sistemnya untuk berperilaku sebagaimana digariskan. Mengawali pembentukan kebiasaan baru adalah dengan pemaksaan, dan pemaksaan yang elegan (bukan arogan), adalah pemaksaan melalui sebuah sistem.

Pada tataran sistem, pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai instrumen kebijakan dengan sedemikian lengkapnya mencakup *Grand Design*, *Road Map* dan berbagai pedoman bagi daerah untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Kota Bogor bertekad mendukung kebijakan nasional ini dengan tidak hanya melaksanakannya saja, tetapi juga melakukan percepatan.

Sebagai salah satu katalisator untuk percepatan ini, hendak digagas kerja sama antara Kota Bogor dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain itu, kebijakan-kebijakan lainnya yang akan diambil adalah penempatan jabatan secara terbuka dengan kualifikasi yang terstandarisasi, pengembangan mekanisme insentif sebagai motivasi ekstra bagi aparatur sipil negara, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga memungkinkan kontrol sosial, serta penerapan *e-government* untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi, dan kepastian.

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi ini, pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan senantiasa mengedepankan prinsip efisiensi dan realokasi anggaran. Efisiensi anggaran ialah penghematan anggaran pada pos-pos yang anggarannya masih memungkinkan untuk dikurangi tanpa mengorbankan *output* atau *outcomes*, dan dana hasil efisiensi itu kemudian direalokasikan untuk pos-pos lain yang dibutuhkan bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Program-programnya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Penataan Tata Laksana;
3. Penataan dan Penguatan Organisasi;
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan;
6. Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan;
7. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
8. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
9. Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa;
10. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
11. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah;
13. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

6. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi setiap daerah di negeri ini. Penanggulangan kemiskinan pun merupakan agenda penting yang selalu menjadi perhatian Kepala Negara dan Kepala Daerah dengan targetnya untuk terus diturunkan. Lahirnya Perpres Nomor 1 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 mengamanatkan daerah untuk menyusun dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai komitmen pemerintah untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai dasar pembangunan. Kemiskinan merupakan permasalahan lintas sektor yang dalam penanggulangannya memerlukan kerja keras dari berbagai pihak, sehingga strategi penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan dengan menyelaraskan berbagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, dan para pihak yang peduli.

Data yang dirilis oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2011 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kota Bogor pada tahun 2010 adalah sebesar 9,47%. Meskipun tingkat ini lebih baik daripada tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat yang sebesar 11,27%, tetap upaya penanggulangan kemiskinan harus terus dilakukan dan ditingkatkan demi harkat, martabat, dan kesejahteraan masyarakat.

Hal yang patut diperhatikan adalah bahwa permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi. Permasalahan ini tidak hanya menyangkut soal pendapatan rumah tangga atau pekerjaan saja, tetapi juga mengenai akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, pangan, air bersih, hingga sanitasi. Oleh karena itu, kemiskinan bukan lagi kondisi kekurangan kebutuhan dasar saja, melainkan merupakan kondisi tidak tercapainya

suatu standar kehidupan yang dianggap layak oleh masyarakat (SMERU, TNP2K, dan SEADI-USAID 2013).

Strategi penanggulangan kemiskinan kota Bogor difokuskan pada pemenuhan hak dasar dengan sasaran pada tiga kategori miskin (miskin, hampir miskin, dan rentan miskin). Terdapat 20 program pemerintah Kota Bogor dalam RPJMD yang mendukung pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ini yaitu:

1. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
2. Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
4. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
5. Perbaikan Gizi Masyarakat;
6. Peningkatan Ketahanan Pangan;
7. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
8. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
9. Pendidikan Menengah;
10. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
11. Peningkatan Kesempatan Kerja;
12. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
13. Lingkungan Sehat Perumahan;
14. Pengembangan Lingkungan Sehat;
15. Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;
16. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
17. Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
18. Pembinaan Anak Terlantar;
19. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
20. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

Program-program pembangunan daerah yang ditampilkan pada tabel berikut ini adalah program-program prioritas yang i) berhubungan dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah dan ii) berhubungan dengan enam bidang prioritas Kota Bogor 2015-2019 sebagaimana diuraikan sebelumnya. Penyajian kebijakan umum dan program pembangunan daerah terdapat pada tabel berikut:

MISI I.

MENJADIKAN BOGOR KOTA YANG CERDAS DAN BERWAWASAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Tujuan I. 1. Meningkatkan implementasi e-government

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Jumlah regulasi tentang implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (dokumen perwali)	1	16	Optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mempermudah pertukaran data dan informasi serta proses komunikasi antar unit pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi antar OPD.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa • Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 	Komunikasi dan Informatika	Kantor Komunikasi dan Informatika
	Jumlah unit kerja (OPD, UPTD, kelurahan, kecamatan, Puskesmas, BUMD) yang terkoneksi internet	127	212				
	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terintegrasi antar OPD (%)	20	100				
	Pembangunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) OPD (unit)	23	48				
	Penyediaan <i>repository data warehouse</i> sebagai basis <i>decision support system</i>	Tidak tersedia	Tersedia				
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah OPD yang memberikan pelayanan publik berbasis internet	3	9	Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi dan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 	Komunikasi dan Informatika	Sekretariat Daerah (Bag. Humas)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Pengadaan barang dan jasa berbasis internet (%)	-	100	Komunikasi (TIK) dalam memberikan pelayanan publik sehingga pelayanan dapat diberikan secara online yang cepat, mudah dan transparan. OPD-OPD yang ada didorong mengembangkan pelayanan semacam ini melalui pembuatan dan operasionalisasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi.	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 	Otonomi Daerah	Dinas Pendapatan Daerah
	Tingkat pelayanan promosi dan investasi berbasis internet (%)	50	100				
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem informasi dan	Jumlah lokasi ruang publik berfasilitas wifi (titik)	1	41	Meningkatkan akses terhadap internet dalam fungsi edukasi dan produktif di ruang publik,	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan Menengah 	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Rasio instansi pemerintah berfasilitas wifi publik (%)	60	100				

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
komunikasi	Jumlah sekolah yang memiliki akses terhadap layanan internet	367	523	instansi pemerintah, dan lokasi strategis lainnya. Hal ini harus dibarengi dengan upaya <i>e-literacy</i> (melek internet) bagi masyarakat luas.	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		
	Jumlah kunjungan web Pemerintah Kota Bogor sebagai media komunikasi dan <i>e-literacy</i> warga	16,8 juta Kunjungan	17 juta kunjungan		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	· Kantor Komunikasi dan Informatika
	Persentase Radio Komunitas yang aktif (%)	60	80		Kerjasama Informasi dengan Media Massa		- Sekretariat Daerah (Bag. Humas)

Tujuan I. 2. Menciptakan lingkungan belajar dengan modal sosial yang kuat

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Berkembangnya minat baca dan belajar di masyarakat	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	18	34	Menyusun dan mengembangkan beragam fasilitas bacaan dan perpustakaan serta lokasi khusus pasar buku murah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap bahan bacaan	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Pendidikan Non Formal 	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Jumlah perpustakaan di satuan pendidikan	453	606		<ul style="list-style-type: none"> ▸ Pendidikan Anak Usia Dini 		
	- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	95	115		<ul style="list-style-type: none"> ▸ Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 		
	- Pendidikan Dasar	275	374		<ul style="list-style-type: none"> ▸ Pendidikan Menengah 		
	- Pendidikan Menengah	83	117		<ul style="list-style-type: none"> ▸ Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 	Perpustakaan	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
	Jumlah pengunjung perpustakaan umum daerah dan keliling	37.00	97.00		<ul style="list-style-type: none"> ▸ Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan 		
	Jumlah perpustakaan bertaraf internasional	0	1				
Berkembangnya ruang kreasi, inovasi, dan	Jumlah sarana kreativitas pemuda di ruang publik	0	3	Menyediakan ruang dan aktivitas yang	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan dan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
berbagi untuk masyarakat				dapat menumbuhkan aktivitas kreatif dan inovatif	(RTH)		Pertamanan
	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	379	384		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda 	Kepemudaan dan Olah Raga	Kantor Pemuda dan Olah Raga
	Jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya	4	7		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 		
					<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 		
	Jumlah kegiatan kepemudaan	12	60		<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Keragaman Budaya 	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0	272		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kesempatan Kerja 	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kantor Pemuda dan Olah Raga
	Masterplan kompleks olahraga (GOR)	0	1				

Tujuan I. 3. Mendorong proses pengambilan keputusan publik yang cerdas

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ	
		AWAL	AKHIR					
Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam perencanaan pembangunan	Tingkat partisipasi Musrenbang Kelurahan (%)	50	70	Mengembangkan sistem perencanaan dan monev pembangunan yang meningkatkan kepedulian dan partisipasi publik terutama dalam proses pembangunan formal strategis. Perhatian perlu diberikan pada fenomena “kelelahan berpartisipasi” (participation fatigue), dimana masyarakat jenuh untuk berpartisipasi akibat implementasi yang tidak sesuai dengan yang	Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Tingkat partisipasi Musrenbang Kecamatan (%)	80	90				Kecamatan	
	Tingkat partisipasi Musrenbang Kota (%)	90	95				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam pelaksanaan pembangunan	Keswadayaan warga dalam Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) (%)	NA	10		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	Kecamatan	
	Tingkat partisipasi dalam Pemilu Kota (%)	75	78					Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
	Tingkat partisipasi dalam Pemilu Provinsi (%)	66	70					Pendidikan Politik Masyarakat

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
	Tingkat partisipasi dalam Pemilu Nasional (%)	75	78	direncanakan. Fenomena ini dapat diminimalkan melalui			
Meningkatnya pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dalam proses pembangunan	Jumlah aduan yang diselesaikan (%)	NA	100	sedikitnya dua cara yaitu (i) kejelasan anggaran yang disediakan, dan (ii) integrasi antara hasil Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 	Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah (Bag. Humas)
Tersedianya baseline data yang kuat, akurat dan mutakhir	<i>Repository data warehouse</i>	Tidak tersedia	Tersedia	Membangun sistem basis data antarinstansi secara akurat dan terintegrasi yang dapat dimanfaatkan untuk	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 	Komunikasi dan Informatika	Kantor Komunikasi dan Informatika
	Tingkat integrasi database mencakup data capaian SPM, IKU/IKK, Indikator Kinerja Daerah RPJM, Indikator Sasaran RPJM (%)	Tidak tersedia	Tersedia	menghasilkan kebijakan publik yang andal. Baseline data ini	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Data dan Informasi 	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ	
		AWAL	AKHIR					
				<p>harus diperankan sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan (<i>decision supporting system</i>) sehingga harus dapat menyajikan berbagai indikator pembangunan seperti pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme untuk mengoptimalkan</p>				
	Jumlah OPD yang menerapkan sistem kearsipan berbasis TI	Tidak Tersedia	Tersedia					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 	Kearsipan		Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 	Statistik		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
				Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai bagian dari <i>baseline data</i> dan <i>decision supporting system</i> .			

Tujuan I. 4. Mengembangkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan dalam upaya mencetak generasi muda yang tangguh dan berkompeten

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Berkembangnya kegiatan pendidikan yang mendukung kompetensi dan karakter	Persentase pendidik yang mendapatkan pelatihan pembelajaran tematik dan pendidikan karakter	31	41	Mengembangkan pola pendidikan yang berlandaskan pada nilai dan karakter disamping muatan akademik dan keterampilan. Selain nilai dan karakter yang bersifat universal, nilai dan karakter lokal juga perlu diperkuat sebagai tercermin dalam budaya dan kearifan tradisional yang ada.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Jumlah sekolah yang mendapat pelatihan pendidikan karakter	6	56		<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Anak Usia Dini • Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 		
	Persentase <i>Dinniyah Takmiliyah</i> yang dibantu penyelenggaraannya oleh pemerintah daerah	NA	100		<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Menengah • Pendidikan Non Formal 		
					<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Lembaga Sosial 	Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah Bag. Kemasyarakatan
Meningkatnya pemerataan akses dan	Pendidik non formal dan informal dengan kulaifikasi S1 (%)	72,14	75,62	Memetarakan akses pendidikan dan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 	Pendidikan	Dinas Pendidikan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
kualitas pendidikan formal, non formal dan informal				menetapkan standar kualifikasi pendidik dan lembaga pendidikan sehingga mampu mendorong lingkungan pendidikan yang lebih berkualitas.	Kependidikan		
					<ul style="list-style-type: none"> ▸ Pendidikan Non-Formal ▸ Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ▸ Pendidikan Menengah ▸ Manajemen Pelayanan Pendidikan 		
	Persentase satuan pendidikan formal yang terakreditasi A	52	175				
	Persentase satuan pendidikan non formal yang terakreditasi (%)	16	36				
	Persentase satuan pendidikan yang menerima bantuan sarana dan prasarana pendidikan (%)	20	45				
	Angka rata-rata lama sekolah	9,93	10,5				
	Angka Partisipasi Murni (APM)						
	- SD/MI/Paket A	97,18	100				
	- SMP/MTs/Paket B	89,60	92				
- SMA/SMK/MA/Paket C	99,94	100					

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Terciptanya generasi muda yang berprestasi	Jumlah medali yang diraih olahragawan pelajar tingkat wilayah dan provinsi	52	175	Memberikan pembinaan dan insentif dalam peningkatan prestasi kualitas pemuda dalam beragam bidang.	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga 	Kepemudaan dan Olah Raga	Kantor Pemuda dan Olah Raga
	Jumlah pemuda pelopor tingkat Jawa Barat dan Nasional	1	1		<ul style="list-style-type: none"> Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Jumlah siswa berprestasi tingkat propinsi	43	53		<ul style="list-style-type: none"> Manajemen Layanan Pendidikan 		
	Jumlah siswa berprestasi tingkat nasional	10	15		<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan Menengah 		
	Jumlah siswa berprestasi tingkat internasional	14	14				
	Jumlah tawuran antar pelajar	80	8				

MISI II.

MENJADIKAN BOGOR KOTA YANG SEHAT DAN MAKMUR

Tujuan II. 1. Meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk hidup dan berperilaku sehat

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (%)	62	100	Mengembangkan program untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap fasilitas kesehatan. Berbagai program ini haruslah inheren dengan program nasional khususnya BPJS.	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Persentase masyarakat miskin terlayani di sarana kesehatan dasar dan rujukan (%)	100	100		<ul style="list-style-type: none"> Upaya Kesehatan Masyarakat 		
	<i>Bed occupancy rate</i> (BOR) di RSUD (%)	0	75		<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 		
	Rasio puskesmas /pustu per kelurahan	0,78	1,00		<ul style="list-style-type: none"> Standarisasi Pelayanan Kesehatan 		
	Sarana kesehatan pemerintah yang terakreditasi	12	25		<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah 		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
					Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata		
	Persentase sarana kesehatan swasta yang memenuhi standar (%)	68	73				
	Jumlah puskesmas rawat inap	3	6				
	Persentase kunjungan dokter pada keluarga pra sejahtera (%)	0	85				
Menurunnya kasus penyakit menular	Prevalensi Tuberculosis BTA positif (per 100.000 penduduk)	110	105	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui perbaikan kualitas kesehatan keluarga dan penurunan penyakit menular.	• Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Angka kematian balita akibat diare	0,7	0,21		• Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		
	Prevalensi HIV AIDS	0,2	<0,5		• Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS	Keluarga Berencana dan	Badan Pemberdayaan Masyarakat

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
					Termasuk HIV/AIDS	Keluarga Sejahtera	dan Keluarga Berencana
	Persentase angka kesembuhan TBC (%)	84	86			Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Pemuda dan Olah Raga
	Tingkat pengetahuan masyarakat tentang HIV/AIDS secara komprehensif	68,40	95,00				
	Jumlah pemuda yang mengetahui bahaya Narkoba dan HIV/AIDS	70	370				
Meningkatnya kualitas kesehatan individu dan keluarga	Persentase balita gizi buruk (%)	0,47	0	Meningkatkan dan memperbaiki kualitas kesehatan individu dan keluarga dengan pengembangan program-program KB, dan program-program yang mengarah pada perbaikan kesehatan kelompok perempuan, anak, remaja, dan lansia	Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi	81	85		Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak Balita		
	Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) (%)	0	15		Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		
	Rasio kematian Ibu per 100.000	13	10				

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
	kelahiran hidup						
	Rasio kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	62	49		<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan Obat dan Makanan 		
	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100		<ul style="list-style-type: none"> • Upaya Kesehatan Masyarakat 		
	Persentase remaja yang mendapat pelayanan kesehatan	39	50		<ul style="list-style-type: none"> • Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 		
	Persentase posyandu berstrata mandiri (%)	58	68		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 		
	Persentase lansia yang mendapat pelayanan kesehatan	30	100			Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
	Kesertaan ber-KB (Akseptor)	111.18 3	156.18 3		<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga Berencana 		
	Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja	24	29		<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan Reproduksi Remaja 		
					<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Pemasarakatan 	Kepemudaan dan Olah	•Kantor Pemuda dan
	Jumlah fasilitasi	15	90				

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ	
		AWAL	AKHIR					
	penyelenggaraan event olahraga Kota Bogor				Olahraga	Raga	Olah Raga	
Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai perilaku bersih dan sehat bagi diri sendiri dan lingkungannya	Persentase masyarakat ber-PHBS (%)	64,88	75	Mengembangkan program yang secara kontinyu memberikan perubahan kesadaran dan perilaku kesehatan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Pengembangan Lingkungan Sehat ▸ Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ▸ Lingkungan Sehat Perumahan 	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
	Persentase Kelurahan siaga aktif (%)	100	100					
	persentase Kawasan yang mematuhi Perda KTR (%)	22,49	55					
	Persentase RW yang mendapatkan sosialisasi mengenai perilaku bersih dan sehat (%)	0	50					
	Persentase akses jamban keluarga (%)	79,3	82,5					

Tujuan II. 2. Meningkatkan kualitas permukiman

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pengelolaan air limbah yang layak	cakupan rumah tangga yang terlayani sistem <i>offsite</i>	366	600	Menciptakan standar dan mengembangkan kualitas permukiman yang sehat melalui perbaikan kualitas sanitasi, redesign permukiman kumuh, dan akses terhadap air minum yang layak.	• Lingkungan Sehat Perumahan	Perumahan Rakyat	Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
	Cakupan rumah tangga dengan pengelolaan air limbah yang layak (%)	2,21	6,17		- Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pekerjaan Umum	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	Cakupan rumah tangga yang terlayani sistem intermediate (KK)	1.020	12.200				Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
Berkurangnya kawasan permukiman kumuh	Jumlah kawasan kumuh (titik)	43	28		• Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Persentase Rumah Sehat (%)	79.5	82.5				
Tersedianya pelayanan air minum yang memadai	Jumlah rumah tangga berakses air minum bersih (non PDAM) *intervensi per tahun)	840	2.500		• Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pekerjaan Umum	Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman

Tujuan II. 3. Merevitalisasi ruang perkotaan yang lebih sehat dan nyaman untuk semua elemen masyarakat (termasuk anak, perempuan, lansia dan difabel)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Meningkatnya jumlah dan kualitas taman-taman kota sebagai ruang publik yang sehat, asri, aman dan ramah pengguna	Jumlah taman kota yang dilengkapi dengan fasilitas yang ramah lansia			Merevitalisasi taman-taman kota dengan peremajaan dan pemeliharaan tanaman, dan pengadaan fasilitas yang ramah anak, lansia, dan difabel. Selain itu, juga diupayakan penambahan taman-taman baru sehingga taman sebagai ruang publik dapat diakses secara lebih luas oleh masyarakat. Hal ini dilakukan demi menguatkan karakter Kota Bogor.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelola an Ruang Terbuka Hijau (RTH) 	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	Jumlah lapangan bermain						
	Jumlah taman kota yang dilengkapi dengan fasilitas bermain anak						
Terpenuhinya kebutuhan kelompok berkebutuhan khusus di ruang publik	Jumlah ruang publik yang memiliki fasilitas difabel				<ul style="list-style-type: none"> • Pengelola an Ruang Terbuka Hijau (RTH) 	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Tujuan II. 4. Meningkatkan ketahanan kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Tertangani dan terfasilitasi ya kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Rumah Tangga Sangat Miskin(RTSM)/KSM Eks Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)	10.487	9744	Menertibkan dan membina PMKS sehingga menjadi warga yang lebih produktif dan mandiri melalui beragam lembaga sosial yang ada serta program-program jangka pendek yang menekankan pada pembentukan mental hidup.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial ▸ Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo ▸ Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial ▸ Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) ▸ Pembinaan Anak Terlantar ▸ Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma ▸ Pemberdayaan 	Sosial	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang ditangani	75	562				
	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan (%)	100	100				
	Jumlah jenis PMKS yang ditangani	19	24				
	Persentase PMKS yang ditangani (%)	53	63				
	Peningkatan kualitas	50	900				

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
	hidup bagi lansia				Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Kecamatan
Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup warga miskin	Persentase KK miskin (%)	8,26	7,18	Melakukan pembinaan terhadap kelompok PMKS sehingga menjadi warga yang lebih produktif dan mandiri melalui beragam lembaga sosial yang ada serta program-program jangka pendek yang	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Partisipasi Masyarakat 	Sosial	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
	Jumlah perempuan kepala keluarga yang dibina	170	420		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan 		
	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni (unit)	-	544		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kelembagaan Ekonomi Kelurahan 	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
					<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 	Perumahan Rakyat	Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
				menekankan pada peningkatan taraf hidup warga miskin dan kelompok PMKS.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Lingkungan Sehat ▸ Perumahan 		
Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan	Persentase kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang ditangani dan terselesaikan (%)	65	75	Menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak melalui pembinaan, pengembangan sarana pengaduan serta penindakan yang tegas terhadap pelaku kekerasan.	▸ Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
	Persentase pendampingan kasus kekerasan terhadap	100	100		▸ Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan	Sosial	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
	Jumlah pekerja anak	100	100		▸ Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
					▸ Peningkatan kelembagaan Ekonomi Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

Tujuan II. 5. Meningkatkan produktifitas dan akses masyarakat terhadap penghidupan yang layak

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Meningkatnya kegiatan perekonomian dan aksesibilitas masyarakat terhadap lapangan pekerjaan yang produktif	Jumlah UMKM yang produktif	10.823	11.002	Mengembangkan sistem ketenagakerjaan terpadu melalui pengembangan keterampilan dan mental wirausaha serta sistem informasi kerja yang uptodate dan iklim bekerja.	<ul style="list-style-type: none"> Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Jumlah IKM yang produktif	700	1075		<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Pembangunan Ekonomi 	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Jumlah SIUP	600	960		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 	Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Jumlah TDP	600	960		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 	Penanaman Modal	- Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal - Kecamatan
	Jumlah penyerapan tenaga kerja	1.308	1.514		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 		Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
	Persentase optimalisasi fungsi BLK (%)	0	100		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kesempatan Kerja 	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi,
	Persen pencari kerja yang dilatih di BLK yang terserap di pasar kerja (%)	26	29				Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
	Jumlah wirausaha baru	128	944				Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Meningkatnya jiwa kewirausahaan dan iklim yang kondusif untuk berkreasi dan berusaha di masyarakat	Jumlah sentra IKM	0	5		<ul style="list-style-type: none"> Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Jumlah IKM yang menerapkan Teknologi	12	37		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 		Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian)
	Jumlah produk yang tersertifikasi yang dihasilkan UMKM				<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas 	Industri	Dinas Perindustrian dan
	- halal	590	1090		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Industri Kecil 		
	- haki	200	450		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kemampuan 		
	Jumlah promosi yang dilakukan				<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil 		Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
					Menengah		
	- ekonomi	10	20		Perindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	- perdagangan	21	41		Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		
	- perindustrian	15	35		Peningkatan dan Pengembangan Ekspor		
	- koperasi	28	69				
	- pertanian	10	50			Pertanian	Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian) Dinas Pertanian
	Jumlah kemitraan dan kerjasama UMKM	3	13		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan		
	Jumlah koperasi aktif	301	726				
	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang menjadi Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum	136	0				

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Berkembangnya agribisnis perkotaan	Produksi Tanaman Hias (Tangkai/Pot)	556.000	597.000	Mengembangkan pertanian dengan memanfaatkan lahan pertanian yang produktif untuk komoditas tanaman hias, ikan hias, dan pengembangan produk olahan.	Program Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	Pertanian	Dinas Pertanian
	Produksi Ikan Hias (Ekor)	14.768.300	20.000.000				
	Jumlah hewan yang dipotong di RPH (Ekor)	174.526	822.960				
	Jumlah produk olahan pertanian binaan	24	84		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan		
	Produk hasil pertanian binaan yang dipasarkan	34	119				
Terjaminnya kualitas dan kebutuhan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86	100	Meningkatkan ketersediaan bahan pangan.	Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan	Kantor Ketahanan Pangan
	Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	100	100		Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Kantor Ketahanan Pangan - Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomia)
	Persentase tingkat pemantauan dan pengendalian inflasi daerah	100	100				

MISI III.

MENJADIKAN BOGOR KOTA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Tujuan III. 1. Meningkatkan kualitas penataan ruang

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Tersusunnya kebijakan penataan ruang yang berwawasan lingkungan	Peninjauan ulang RTRW Kota Bogor 2011-2031 (dokumen)	0	1	Mengimplementasikan penataan ruang secara tegas dengan mengembalikan kenyamanan Kota Bogor melalui peran serta masyarakat dalam pengendalian.	Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Jumlah rencana umum, rencana detil dan rencana pengembangan kawasan yang disusun (RDTR/RTBL)	6	36				Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
Meningkatnya implementasi rencana tata ruang dan kendali terhadap pemanfaatan ruang	Frekuensi pembinaan kepada masyarakat (per tahun)	1	11		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang	Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Jumlah regulasi penataan ruang (perda/perwali)	10	20				
	Persentase tindak lanjut atas pengaduan pelanggaran tata ruang (%)	100	100	Pemanfaatan Ruang			
	Tingkat konsistensi pemanfaatan ruang	0	90				

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Meningkatnya luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota	Luas Ruang Terbuka Hijau (ha)	39	43.15	Membebaskan sempadan sungai atau sumber air lainnya dan memanfaatkan aset yang belum dioptimalkan serta mengoptimisasikan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) eksisting.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Areal Pemakamam • Pemanfaatan Ruang 	Perumahan Rakyat Penataan Ruang	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	Persentase luas Ruang Terbuka Hijau Kota dalam kondisi terpelihara (%)	100	100				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan Konservasi Sumber daya alam 	Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
					<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 		Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Tertatanya Pedagang Kaki Lima serta pasar tradisional	Persentase Pedagang Kaki Lima yang mendapatkan pembinaan (%)	-	100	Menciptakan ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional dan pentaan Pedagang Kaki Lima.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan • Peningkatan Efisiensi Perdagangan 	Perdagangan	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Jumlah review zoning Pedagang Kaki Lima terhadap 14 zona	-	100				PD Pasar

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
	Pedagang Kaki Lima (%)				Dalam Negri		
	Jumlah pasar tradisional yang ditata	2	7		<ul style="list-style-type: none"> ▸ Peningkatan Kantrantibma ▸ Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi ▸ Perencanaan Tata Ruang ▸ Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 	<ul style="list-style-type: none"> Otonomi Daerah Perhubungan Penataan Ruang Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kebersihan dan Pertamanan

Tujuan III. 2. Meningkatkan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan kota

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Menurunnya tingkat pencemaran akibat aktivitas perkotaan	Tingkat pemenuhan baku mutu kualitas	20	100	Mengimplementasikan regulasi standar kualitas pencemaran yang diiringi dengan perubahan sistem kota yang lebih ramah lingkungan.	▸ Pengendalian Pencemaran	Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan
	Tingkat pemenuhan baku mutu kualitas	20	100		▸ Program Pengembangan	Perhubungan	Dinas Lalu Lintas dan
	Tingkat pemenuhan baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa (%)	20	100		▸ Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pekerjaan Umum	· Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
							- Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Meningkatnya upaya pemulihan dan konservasi sumber daya alam	Jumlah sumber mata air yang dilindungi (lokasi)	34	40	Memulihkan dan konservasi sumber daya alam dengan prioritas pada sumber air baku.	▸ Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Jumlah Situ/Danau/Kolam	5	7		▸ Penguatan Kebiakan dan	Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
	Panjang Saluran Irigasi Berkondisi Baik (km)	11	11		▸ Pengembangan dan Pengelolaan		
Terwujudnya penataan dan	Panjang Sungai/Saluran	174,54	194,54	Mewujudkan kota riverfront melalui	▸ Pengembangan, Pengelolaan,	Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga dan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS)	Berkondisi Baik (km)			sterilasi Daerah Aliran Sungai dari aktivitas budidaya yang mengganggu.	dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya		Sumber Daya Air
				Memperlakukan dua sungai utama yang melalui Kota Bogor yaitu Ciliwung dan Cisadane sebagai <i>ecoregion</i> sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara lintas daerah	Perencanaan Sosial Budaya	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan	Jumlah sekolah yang dibina untuk menjadi sekolah Adiwiyata dan sekolah berbudaya lingkungan per tahun	50	100	Mewujudkan kota yang lebih ramah lingkungan dengan menekankan pada perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat melalui pendidikan formal dan pembinaan secara kontinyu.	Kemitraan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Jumlah sosialisasi lingkungan hidup (tema)	1	3				

Tujuan III. 3. Mengembangkan transportasi kota yang mengutamakan angkutan umum massal, pejalan kaki dan pesepeda

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Terwujudnya sistem angkutan umum kota yang nyaman dan ramah lingkungan	Jumlah angkutan umum berbahan bakar alternatif	0	1000	Mewujudkan sistem pergerakan yang efisien dan ramah lingkungan yang berdasarkan pada sistem angkutan massal yang memadai.	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan 	Perhubungan	Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
					<ul style="list-style-type: none"> Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 	Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
					<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana 	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Jumlah Prasarana & Sarana Perhubungan Terbangun & Terpelihara	4	72		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi 		
	Operasional Jumlah Koridor BTS Trans Pakuan (koridor)	3	7		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Pelayanan Angkutan Umum 		
Jumlah panjang ruas jalan utama (Arteri, Kolektor & Lokal) terbangun sesuai arahan RTRW 2011 - 2031 (km)	266.468	276.048	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Jalan dan Jembatan 	Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
	Persentase Panjang Jalan Berkondisi Mantap (Baik & Sedang) (%)	86	89		<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Peningkatan sarana prasarana perkotaan 		
Meningkatnya kualitas sarana prasarana pejalan kaki dan pengguna sepeda	Panjang Prasarana Pedestrian yang meningkat kapasitasnya (km)	0,545	24,813	Peningkatan kenyamanan dalam berjalan kaki yang ramah bagi setiap kalangan. Model sarana pedestrian ideal yang dikembangkan bersama Program <i>Sustainable Urban Transport Improvement Project</i> (SUTIP) GIZ akan menjadi percontohan untuk dikembangkan selanjutnya. Pengembangan jalur pesepeda akan dimulai pada koridor jalan utama yang telah ada, kemudian dalam proses	Peningkatan Prasarana Pedestrian	Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
	Panjang Prasarana Pedestrian Jalan Utama Terbangun (km)	249.40	271.06				
	Jalur sepeda yang dikembangkan (koridor)	0	3			Perhubungan	Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
				evaluasi akan dikembangkan jalur lain yang memadai.			
Berkurangnya kemacetan	Rata-rata waktu tempuh di lokasi rawan kemacetan (km/jam)	20,08	23	Menargetkan pengurangan jumlah kendaraan pribadi dengan meningkatkan pelayanan angkutan umum yang memadai disertai dengan evaluasi dan pengembangan kawasan parkir (<i>park on ride</i>). Pengadaan gedung parkir pada pusat kota akan memanfaatkan akuisisi lahan dan <i>land banking</i> . Upaya ini diiringi dengan peningkatan penggunaan <i>non-motorized transport</i> .	<ul style="list-style-type: none"> › Peningkatan Kualitas Pelayanan Angkutan Umum › Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi › Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi 	Perhubungan	Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tujuan III. 4. Mendorong pembangunan kota yang tanggap risiko bencana dan dampak perubahan iklim

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah kejadian bencana	295	286	Mewujudkan masyarakat dan pemerintah yang siap-tanggap dalam menghadapi bencana di beberapa daerah prioritas. Selain itu, menjadikan Kota Bogor sebagai bagian dari komunitas internasional yang secara bersama-sama mengurangi pemanasan global diantaranya melalui penghijauan kota, <i>green building</i> , dan partisipasinya	▸ Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	Persentase ketersediaan sarpras terhadap kebutuhan	10	100		▸ Lingkungan sehat perumahan	Perumahan	Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
						▸ Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Perencanaan Pembangunan
Meningkatnya tanggap darurat saat bencana	Tingkat penanganan kejadian bencana (%)	100	100		▸ Tanggap Darurat Bencana	Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
						Sosial	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
						Pekerjaan Umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
				dalam berbagai kampanye seperti <i>Earth Hour</i> .			Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
							Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
							Dinas Kebersihan dan Pertamanan
						Sosial	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
						Kesehatan	Dinas Kesehatan
					› Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Perumahan	Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
					› Penanganan	Kesatuan	Kantor
Meningkatnya pemulihan pasca bencana	Tingkat pemulihan pasca bencana (%)	100	100		› Pemulihan Pasca Bencana	Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
							Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
						Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
							Dinas Kebersihan dan Pertamanan
					<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial 	Perumahan	Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
Meningkatnya pengelolaan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim	Jumlah kampung iklim	0	5		<ul style="list-style-type: none"> Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 	Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan III. 5. Menerapkan pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Meningkatnya pelayanan persampahan	Volume sampah terangkut	70,37	75,37	Meningkatkan pelayanan sampah melalui kerjasama antardaerah untuk Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang menerapkan sistem sanitary landfill serta pelayanan pengangkutan sampah.	Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	Volume sampah yang diolah di TPA	1.756	1.941				
						Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup
Meningkatnya Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	Jumlah TPS 3R di tempat yang belum terlayani oleh angkutan (lokasi)	13	18	Mereduksi jumlah sampah yang diangkut melalui upaya 3R (<i>Reuse Reduce Recycle</i>) yang didasarkan pada penerapan teknologi dan perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat khususnya di tingkat rumah tangga, RT, RW dan	Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	Lingkungan Hidup Perencanaan Pembangunan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	Jumlah Bank Sampah (lokasi)	10	85				
					Perencanaan Sarana Prasarana Kota		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Internalisasi pengelolaan sampah sebagai bagian dari	Persentase Reduksi Sampah (%)	3,2	4,7		Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	Persentase pengelolaan sampah	13	18				

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
budaya hidup masyarakat	di tingkat rumahtangga (%)			kelurahan. Maka dalam penenerapan budaya di masyarakat, peran dan kewenangan kecamatan akan lebih ditingkatkan. Pengembangan bank sampah dapat dikerjasamakan dengan pihak pemulung dengan memulai pada wilayah percontohan yang ditentukan.			

MISI IV.

MENJADIKAN BOGOR SEBAGAI KOTA JASA YANG BERORIENTASI PADA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

Tujuan IV. 1. Menjadikan warisan budaya sebagai aset kota

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya	Persentase grup kesenian yang aktif memelihara dan mengembangkan seni dan budaya (%)	70	100	Mendorong keaktifan beragam organisasi dan lembaga dalam kegiatan pelestarian budaya baik maupun non bendawi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Nilai Budaya 	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Jumlah lembaga yang menangani bidang kesenian dan budaya	8	16		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 		
	Jumlah kelompok pelestari warisan budaya	51	62				
	Jumlah kegiatan pelestarian warisan budaya yang melibatkan masyarakat	91	130				
Terpeliharanya kelestarian warisan budaya	Jumlah kemitraan dalam pelestarian warisan budaya	9	16	Memperkuat upaya pelestarian warisan budaya melalui pembuatan regulasi,	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	1	5		<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Kekayaan Budaya 		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
	Jumlah gelar seni dan budaya yang diselenggarakan	30	80	kemitraan antarpihak, dan sarpras pendukung khususnya di kawasan cagar budaya.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Pengelolaan Keragaman Budaya 		
	jumlah kegiatan pengadaan sarana prasarana pendukung di kawasan Cagar budaya	30	70		<ul style="list-style-type: none"> ▸ Pengendalian Pemanfaatan Ruang 	Penataan Ruang	Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
	jumlah kegiatan pengadaan sarana prasarana kesenian budaya	68	145		<ul style="list-style-type: none"> ▸ Perencanaan Tata Ruang 	Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
	Gedung Kesenian	1	2				
	Jumlah kelompok/komunitas kesenian budaya di Kota Bogor yang dibina	20	30		<ul style="list-style-type: none"> ▸ Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung 	Perumahan Rakyat	Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
	Jumlah sanggar kesenian budaya di Kota Bogor yang dibina	40	52				Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
	Jumlah Cagar Budaya yang diinventarisir	224	239		<ul style="list-style-type: none"> ▸ Peningkatan Utilitas Perkotaan 		Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	Jumlah peraturan daerah yang mengatur pelestarian				<ul style="list-style-type: none"> ▸ Penataan dan Pemberdayaan 	Koperasi dan Usaha Kecil	Kantor Koperasi Usaha

Tujuan IV. 2. Memperkuat identitas dan citra Kota Bogor (*City Branding*)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Meningkatnya fungsi kawasan penyangga kebun raya secara fisik, visual dan ekologis	Jumlah kebijakan/peraturan daerah yang menetapkan Kebun Raya Bogor sebagai benchmark pembangunan kota			Merencanakan kawasan penyangga Kebun Raya Bogor (KRB) sehingga pengembangan kawasan penyangga dapat kompatibel dengan keberadaan KRB. Membangun regulasi yang kokoh sehingga pengembangan kawasan penyangga sesuai dengan tema <i>Garden Compatible Development</i>	Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman
	Rencana rinci pengembangan kawasan penyangga Kebun Raya Bogor	Belum ada	ada				
Diterapkannya konsep perancangan kota (<i>urban design</i>), termasuk <i>street furniture</i> yang meningkatkan citra kota	Jumlah panduan rancang kota	Belum ada	ada	Membangun beragam tapak di Kota Bogor melalui konsep dan rancangan kota yang jelas dan			
	Dokumen konsep pengembangan <i>city branding</i>	Belum ada	ada				

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
				mendukung imaji kota yang berdasarkan pada panduan rancang kota dan City Branding			
Dijadikannya Bogor sebagai Pusat Pengetahuan dan Penelitian bidang pertanian dan botani	Jumlah kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga penelitian dalam dan luar negeri	10	15	Mengaktifkan kembali potensi penelitian dan peningkatan pengetahuan pertanian dan botani Kota Bogor melalui kerjasama dalam negeri dan luar negeri.	<ul style="list-style-type: none"> Kerjasama Pembangunan 	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tumbuh berkembangnya aktivitas MICE (<i>Meeting, Incentives, Conferences/Convention, Exhibitions/Events</i>)	Jumlah sarana dan prasaranan pendukung MICE	6	14	Memfasilitasi berkembangnya aktivitas MICE dengan membangun infrastruktur MICE berskala internasional, mendorong sertifikasi hotel, dan dengan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Destinasi Pariwisata 	Pariwisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
				menerapkan regulasi yang tegas sehingga membuat Kota Bogor tetap nyaman. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur MICE (seperti convention centre, hotel) harus dalam batas-batas yang dikendalikan agar tidak kontraproduktif terhadap sisi kenyamanan kota.			

Tujuan IV. 3. Mengembangkan Pariwisata Kota Bogor yang berkarakter

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Berkembangnya destinasi wisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	16	18	Mengembangkan industri pariwisata yang terintegrasi melalui pengembangan paket, sarpras pariwisata (peta, petunjuk, kawasan oleh-oleh), promosi dan pemasaran.	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Jumlah Kunjungan Wiasatawan Nusantara	3.769.787	6.071.280		Pengembangan Pemasaran Pariwisata		
	Jumlah Kunjungan Wiasatawan Mancanegara	183.807	296.023				
	Jumlah event/pameran yang diikuti per tahun	6	8				
	Badan promosi pariwisata daerah yang terbentuk	0	1				
Meningkatnya peran kelembagaan pariwisata	Jumlah kompepar	1	6		Pengembangan Kemitraan	Pariwisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Jumlah kerjasama yang dilakukan	1	1				

Tujuan IV. 4. Mengembangkan iklim ekonomi kreatif

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Terciptanya iklim industri kreatif	Jumlah Industri kreatif	172	342	Menginisiasi penciptaan iklim yang kondusif bagi ekonomi kreatif melalui penciptaan ruang kreatif, pembinaan SDM kreatif, dan kemitraan sebagai sarana transfer pengetahuan dan praktikal. Melalui Tahapan berikut:	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Industri	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Terjalannya kemitraan antar pelaku industri kreatif	<i>Bogor Creative Forum</i>	0	1	1) Creative-waves, yaitu menciptakan gelombang kreatifitas; 2) Creative-network, yaitu membangun jejaring sesama pelaku ekonomi kreatif; 3) Creative-preneur, yaitu	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah • Peningkatan Kreatifitas Masyarakat 	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Saung Kreaftif	0	68				Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Jumlah komunitas kreatif	10	60				Sekretariat Daerah (Bag. Kemasyarakatan)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Terciptanya SDM yang kreatif dan wirausahawan kreatif	Jumlah insan kreatif yang menerima penghargaan	1	3	membangun orang-orang kreatif sebagai wirausahawan. Dibutuhkan model triple-helix dalam pengembangan ekonomi kreatif, ialah pelibatan tiga pihak utama meliputi pemerintah, pebisnis, dan kaum intelektual. Hanya saja, intervensi pemerintah perlu dilakukan secara hati-hati dan terukur mengingat kreatifitas justru bisa tenggelam oleh intervensi yang bersifat keproyekan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri • Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 	Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Jumlah pelatihan kewirausahaan industri kreatif	4	9				<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Koperasi dan UMKM
	Jumlah produk berkualitas ekspor	19	29				

MISI V.

MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BERSIH DAN TRANSPARAN

Tujuan V. 1. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Indeks integritas daerah	7.29	7.51	Membangun pemerintahan yang berintegritas dengan perbaikan kinerja keuangan dan akuntabilitas melalui komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan standarisasi kompetensi jabatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 	Seluruh Urusan	Seluruh OPD
					<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
					<ul style="list-style-type: none"> • Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 		Sekretariat Daerah (Bag. Humas)
	Penetapan zona integritas/wilayah bebas korupsi (OPD)	0 (2014)	5	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 	Otonomi Daerah	Inspektorat	
Opini BPK atas laporan keuangan	WDP	WTP	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			
						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ	
		AWAL	AKHIR					
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	CC (2012)	B		Aset Daerah			
					<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
								Sekretariat Daerah (Bag.Keuangan)
	Aparatur yang memenuhi standar kompetensi jabatan	60%	85%		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 	Seluruh Urusan		Seluruh OPD Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian)
					<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan 	Otonomi Daerah,		Sekretariat Daerah (Bag.Pemerintahan)
	Terbentuknya OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>) (perda)	1	1 Perda		<ul style="list-style-type: none"> Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 	Otonomi Daerah		Sekretariat Daerah (Bag.Organisasi)
	Konsistensi antara	97	>97					

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
	rencana kegiatan OPD dan implementasinya (%)						
	Pengisian jabatan melalui seleksi terbuka (%)	100			<ul style="list-style-type: none"> ▸ Penataan dan Penguatan Organisasi ▸ Pengendalian Pembangunan ▸ Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi ▸ Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah ▸ Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 		Sekretariat Daerah (Bag Pengendalian Program) Sekretariat Daerah (Bag. Humas) Sekretariat DPRD ·Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat pada seluruh OPD yang	2,5.	3,25	Memperkuat relasi pemerintah	▸ Peningkatan Sarana dan Prasarana	Seluruh Urusan	Seluruh OPD

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
publik kepada masyarakat	memberikan pelayanan publik			dan masyarakat melalui perbaikan kualitas pelayanan publik dan penyediaan informasi publik secara lebih mudah dan terbuka.	Aparatur		
	Persentase OPD yang menetapkan SOP pelayanan publik (%)	50	100		<ul style="list-style-type: none"> ▸ Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan 	Otonomi Daerah	Kecamatan
					<ul style="list-style-type: none"> ▸ Penataan Tata Laksana 		Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
					<ul style="list-style-type: none"> ▸ Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 		Sekretariat Daerah (Ba. Organisasi)
					<ul style="list-style-type: none"> ▸ Penataan Administrasi Kependudukan 	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik	OPD yang menyediakan informasi publik sesuai UU KIP (%)	10	100		<ul style="list-style-type: none"> ▸ Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 	Komunikasi dan Informastika	Sekretariat Daerah (Bag. Humas)
	Persentase permintaan akan informasi publik yang terlayani oleh PPID dan PPID pembantu (%)	20	100				

Tujuan V. 2. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar daerah dan internasional

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Terbangunnya kesepahaman bersama antar daerah mengenai isu-isu lintas wilayah dalam bidang ekonomi dan pengembangan wilayah, pelayanan publik, serta lingkungan hidup	Jumlah bidang kesepakatan bersama antar daerah (bidang)	5	18	Memperkuat kerjasama antardaerah dalam pembangunan dalam bidang-bidang prioritas. Selain itu, kerja sama ini juga dilakukan dalam rangka menguatkan posisi Kota Bogor dalam konstelasi Jabodetabekpunjur	Kerja Sama Pembangunan	Otonomi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Daerah (Bag. Pemerintahan) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Kelembagaan kerja sama regional yang berjalan	2	2				
	Jumlah forum internasional yang digiati	2	3				
	Jumlah kerja sama dengan pihak ketiga internasional	6	6				
	Jumlah kerja sama dengan kota-kota luar negeri	2					
Jumlah perusahaan swasta, BUMD yang berkontribusi terhadap pembangunan Kota Bogor.	9	14					

Tujuan V. 3. Meningkatkan sinergitas antara pemerintah kota dengan elemen masyarakat

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Meningkatnya event-event yang memunculkan ikatan dan kecintaan antara warga dan kotanya	Jumlah event yang memunculkan ikatan dan kecintaan antara warga dan kotanya	10	15	Memfasilitasi interaksi antara kota dengan masyarakat dan komunitas melalui beragam kegiatan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat didalamnya. Sebagai contoh diantaranya adalah Lomba Mulung di Ciliwung Antar Kelurahan yang dilakukan setiap Hari Jadi Kota Bogor.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Keragaman Budaya 	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Jumlah warga yang berpartisipasi dalam event-event dimaksud	250	500		<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Keragaman Budaya 		
Terfasilitasinya organisasi, komunitas dan sejenisnya yang memiliki fokus terhadap pembangunan kota	Jumlah organisasi, komunitas, dan sejenisnya yang difasilitasi	78	78		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 	Kepemudaan dan Olahraga	Kantor Pemuda dan Olahraga
	Jumlah kegiatan bersama yang diadakan oleh pemerintah daerah dan organisasi/komunitas dimaksud	4	29				
Optimalisasi keberadaan dan peran serta berbagai perguruan	Persentase perguruan tinggi dan LSM setempat yang bekerjasama dengan pemerintah kota (%)	3	6	Menggunakan kajian dan kepakaran IPTEK dan inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama Pembangunan 	Perencanaan Pembangunan	Sekretariat Daerah (Bag. Pemerintahan)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
tinggi dan lembaga swadaya masyarakat setempat dalam pembangunan kota Bogor	Jumlah ormas yang bekerjasama dengan pemerintah kota	34	40	perguruan tinggi dan LSM kompeten dalam pengambilan kebijakan pembangunan	Pemberdayaan Lembaga Sosial	Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah (Bag. Kemasyarakatan)
Tersedianya ruang bagi elemen warga untuk turut memberi pertimbangan dalam segala pengambilan kebijakan mengenai pembangunan kota	Dewan kota atau nama lain yang menjadi ruang bagi elemen warga untuk turut memberi pertimbangan dalam segala pengambilan kebijakan mengenai pembangunan kota	Belum ada	Terbentuk dan berjalan	Memfasilitasi terbentuknya Dewan Kota atau nama lain sebagai sarana peningkatan proses partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik strategis.			

Tujuan V. 4. Memperkuat perundang-undangan daerah

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Tersusunnya perundang-undangan daerah yang sinkron dan sinergis	Perundang-undangan daerah yang disusun/perubahannya dikonsultasikan dengan seluruh pemangku kepentingan (%)	100	100	Menyusun peraturan perundang-undangan yang tidak tumpang tindih melalui harmonisasi perundang-undangan daerah.	• Penataan Peraturan Perundang-undangan	Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah (Bag.Hukum)
					• Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					• Pemanfaatan Ruang • Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
Harmonisnya perundang-undangan daerah	Perundang-undangan daerah yang harmonis (%)	100	100				
Tegaknya perundang-undangan daerah	Penindakan tindak pidana ringan (%)	60	80	Menegakkan peraturan perundang-undangan daerah, terutama untuk menjaga ketertiban dan keamanan, kenyamanan, dan konsistensi tata ruang.	• Penataan Peraturan Perundang-undangan	Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah (Bag.Hukum)
	Jumlah gugatan perkara hukum tata usaha negara dan perdata	20 perkara	<20 perkara		• Penegakan Hukum dan Penerapan HAM		
	Konsistensi rencana tata ruang (WP)	5	5		• Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Satuan Polisi Pamong Praja
					• Peningkatan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		

MISI VI.**MENGOKOHKAN PERAN MORAL AGAMA DAN KEMANUSIAAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI****Tujuan VI. 1 Meningkatkan integrasi nilai dan norma agama dalam implementasi kehidupan**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Digunakannya nilai-nilai agama dan kemanusiaan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari	Angka kriminalitas	0,142 (2012)	< 0,142	Mengimplementasikan nilai agama dan kemanusiaan untuk meningkatkan kualitas nilai kehidupan. Hal ini terekspresikan diantaranya dari penurunan angka kriminalitas dan penyakit masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan Lembaga Sosial 	Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah (Bag. Kemasyarakatan)
	Jumlah Korban Narkotika dan HIV/AIDS/WTS yang dibina	50	1.550		<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial 	Sosial	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
						<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Tujuan VI. 2. Mendorong harmonisasi dan kerukunan antar umat beragama

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Terselenggaranya aktivitas lintas agama	Jumlah dialog rutin lintas agama (kali/tahun)	7	35	Mewujudkan pemahaman antar umat beragama melalui dialog dan aktivitas rutin antar agama untuk menurunkan potensi konflik horizontal.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Terdeteksi dan tertanganinya potensi permasalahan antar umat beragama	Persentase deteksi dini permasalahan antar umat beragama (%)	100	100	Mengembangkan deteksi dini dalam potensi konflik dengan melakukan intermediasi dan pencerdasan publik melalui media.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase Deteksi dini permasalahan antar umat beragama yang dapat tertangani (%)	100	100				
	Konflik SARA	0	0				

Tujuan VI. 3. Mendorong peran lembaga-lembaga agama dan organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
Meningkatnya peran lembaga agama dan organisasi kemasyarakatan dalam aktivitas pembangunan masyarakat	Jumlah lembaga keagamaan yang dibina			Memfasilitasi lembaga keagamaan dan kemasyarakatan untuk berkontribusi dalam pembangunan khususnya pemberantasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, diantaranya melalui pemanfaatan zakat atau bentuk-bentuk dana umat lainnya. Termasuk didalam lembaga keagamaan tersebut adalah lembaga penyelenggara pendidikan seperti Diniyah Takmiliah dengan kontribusinya pada pembangunan sumber daya manusia dan karakter.	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 	Sosial	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina	34	40		<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 		
	Jumlah kegiatan sosial pemberdayaan ekonomi				<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan Lembaga Sosial 	Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah (Bag. Kemasyarakatan)
	Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang terbentuk	16	68		<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan Umat Islam dan Umat Beragama Lainnya 		
	Jumlah panti asuhan yang dibina	72	84		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Wawasan Kebangsaan 	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Jumlah panti asuhan milik Pemda	0	1		<ul style="list-style-type: none"> Kemitraan Pengembangan 		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		STRATEGI	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD PJ
		AWAL	AKHIR				
					gan Wawasan Kebangsaan		
	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan (orang per tahun)	600	600		• Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Jumlah penyuluhan kepada ormas dan LSM (kali/tahun)	2	3		• Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sosial	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
	Jumlah lembaga sosial yang berpartisipasi aktif dalam penanganan PMKS	65	90				Kecamatan